

**ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEMENANGAN
CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI GOLONGAN KARYA
DI DAERAH PEMILIHAN III KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014**

Oleh:

Fauzan Azhima

favzanazhima@gmail.com

Pembimbing: Adlin S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The existence of woman in Indonesia parliament is still far from insufficient. Woman Legislators either in central or region of parliament has not indicate any significant growth. The electoral support is become one of the capital required of woman candidates to compete in elections. In Karimun, a region from Province of Riau Island recorded only three candidates were succeed to become the legislator as one of them able to achieve significant vote. Based on the background of these problems researcher interested to conduct more in-depth study on “Winning Factor of a Woman Candidate Golongan Karya Party in District III Karimun Region Riau Island Province”. The method used in this study is a qualitative research method. From the research that has been made known that the required capital with a good management could make a candidate take the victory in Legislative Election. The capital is divided into three part as known as social capital, political capital, and economic capital. The three based capital with prudent management is able to give victory to candidates.

Keywords : Candidate, Capital , Parliamentary, Woman

PENDAHULUAN

Keberadaan calon legislatif perempuan dalam parlemen selalu menjadi perbincangan, pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan masih dirasakan kurang mendukung tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum

yang dilaksanakan pada tahun 2014, diikuti oleh 15 partai politik dimana terdapat 3 partai politik lokal Aceh ikut dalam pemilu. Partai-partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai

Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPI. Pada pemilihan umum legislatif DPR tahun 2014, calon legislatif perempuan mampu menduduki posisi pertama dalam daftar 10 besar peraih suara tertinggi dalam pemilihan umum.

Terpilihnya calon legislatif perempuan dengan perolehan suara tertinggi di DPR menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap caleg perempuan di Indonesia semakin meningkat. Namun, sebenarnya terjadi penurunan jumlah anggota DPR perempuan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu 103 orang (2009) berbanding 79 (2014). Penurunan jumlah keterwakilan perempuan dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat ini cukup membingungkan dan sekilas menggambarkan betapa caleg perempuan masih sulit memperoleh kursi dalam parlemen.

Di beberapa daerah, meskipun calon legislatif perempuan mampu menduduki posisi 10 besar peraih suara tertinggi pada pemilihan umum, namun kuota 30% keterwakilan perempuan belum mampu terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat yang menganggap bahwa kalangan perempuan tidak lebih baik dalam memimpin dan kurang berpengalaman dalam berpolitik. Berkembangnya pemikiran semacam

ini membuat eksistensi perempuan dalam lingkungan politik masih kurang.

Pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Karimun menempatkan seorang calon legislatif perempuan dalam daftar peraih 10 besar suara tertinggi atas nama Hj. Rohani yang merupakan calon legislatif Partai Golongan Karya di daerah pemilihan III. Hj. Rohani merupakan calon legislatif perempuan yang pertama kali mampu memperoleh kursi legislatif di daerah pemilihan III. Perolehan suara yang didapatkan oleh Hj. Rohani di salah satu Kecamatan yang ada di daerah pemilihan III bahkan mengalahkan calon legislatif *incumbent* yang notabene memiliki pendukung yang cukup banyak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sehubungan faktor pendukung kemenangan caleg perempuan Partai Golkar di dapil III Kabupaten Karimun dengan judul: **"Analisis Faktor Pendukung Kemenangan Calon Legislatif Perempuan Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014"**

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: *Apa*

sajakah yang menjadi faktor pendukung kemenangan calon legislatif perempuan Partai Golongan Karya di daerah pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014?”

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung kemenangan calon legislatif perempuan Partai Golongan Karya di daerah pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Dalam perspektif akademik, penelitian ini berguna dan dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual peneliti mengenai pemilihan umum legislatif dan faktor pendukung kemenangan calon legislatif perempuan di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Karimun khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, pertimbangan dan pemikiran yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif dan faktor kemenangan calon legislatif perempuan di daerah.

KERANGKA TEORITIS

1. Dukungan Politik

Untuk meraih dukungan politik dalam pemilihan umum, calon

legislatif hendaknya memperhatikan faktor-faktor pendukung yang mampu mendongkrak suara pemilih untuk memilihnya. Salah satu faktor pendukung utama keterpilihan calon legislatif adalah seberapa jauh ia mampu mengoptimalkan modal-modal dan sumber daya politik yang dimilikinya. Umumnya ada tiga modal yang dipakai calon legislatif dalam pemilihan umum, yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi (Marijan, 2006).

Modal sosial menurut Marijan (2006) berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon legislatif dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana calon legislatif itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa ia memang layak untuk mewakili daerahnya. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon itu harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan.

Seyd dan Whitely (dalam Benister, 2012) melihat modal politik sebagai sejauh mana lembaga ini dianggap sah dan dapat dipercaya. Hal itu berakar pada kepercayaan masyarakat, penghormatan, dan lembaga sistem politik. Modal politik dengan demikian merupakan versi lain

modal sosial yang beroperasi secara vertikal dalam masyarakat dibandingkan secara horizontal dan produk hubungan antara warga dan pemerintah. Sama seperti jaringan obligasi masyarakat menciptakan modal sosial sehingga jaringan keterlibatan politik bertanggung jawab untuk menghasilkan modal politik.

Lebih lanjut menurut Lopez (dalam Benister, 2012), modal politik dilihat sebagai pertukaran (*trade-off*) antara dua varian yang disebut dengan “perwakilan” dan “reputasi”. Modal politik perwakilan berkaitan dengan dukungan konstituen atau legitimasi yang mungkin bisa diperoleh atau dikabulkan, sedangkan modal politik reputasi berkaitan dengan keterampilan politik individu.

Modal ekonomi dalam politik berkaitan dengan kemampuan seorang pelaku politik dalam bentuk materi, biasanya berupa uang. Meskipun uang bukan segalanya dalam menjamin kemenangan calon legislatif, tapi sebagian besar caleg yang memiliki modal uang yang besar dalam pemilu akan berpeluang besar terpilih menduduki kursi legislatif. Secara luas, pengertian modal ekonomi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Bila kemudian kita konversikan dengan situasi pemilihan legislatif saat ini maka dominasi modal ekonomi akan jauh lebih terlihat dibandingkan dengan modal-modal lainnya tanpa harus

mengesampingkan bahwa diantara modal-modal tersebut memiliki salingketergantungan yang kuat (Umainalo, t.t).

2. Pemilihan Umum Legislatif

Pengertian pemilu menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, dijelaskan bahwa partai politik wajib memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan didalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum diharapkan mampu menghadirkan sosok legislator perempuan yang berdaya saing, memiliki intelektual dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia. Perempuan yang berdaya saing dalam politik memiliki kekuatan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik sehingga segala isu terkait masalah perempuan di Indonesia mampu sedikit demi sedikit diatasi agar hambatan dalam

pemberdayaan perempuan semakin berkurang.

3. Peran Partai Politik dalam Keterwakilan Perempuan

Keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum tidak terlepas dari peran partai politik, sebagaimana pendapat Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 1981) yang menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sedangkan fungsi partai politik adalah memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan pengatur konflik.

DEFINISI KONSEP

- i. Faktor pendukung adalah bentuk-bentuk dukungan politik yang mampu membuat calon legislatif meraih kursi parlemen.
- ii. Dukungan politik adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang diberikan terhadap calon legislatif yang ikut dalam pemilihan umum
- iii. Pemilihan umum legislatif adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih calon legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan dengan asas luber jurdil berdasarkan asas-asas pancasila dan UUD 1945

- iv. Modal calon legislatif dalam pemilu terdiri dari modal politik, modal ekonomi dan modal sosial yang merupakan sumber daya pendukung kemenangan calon legislatif dalam pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Creswell (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun umumnya dan Daerah Pemilihan III (Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat dan Kecamatan Ungar) khususnya untuk melengkapi data dalam penelitian. Penelitian juga dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

a. Informan dan *Key Informan*

Informan kunci (*key informan*) adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok

Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

b. sumber Data Lain

Untuk melengkapi data dalam penelitian, peneliti melengkapi data melalui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Pendukung Kemenangan Calon Legislatif Perempuan

1. Gambaran Eksistensi Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Umum

Pada dasarnya, kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi kepentingan rakyat. Namun kenyataannya, hingga saat ini sektor-sektor strategis dalam parlemen ataupun lembaga-lembaga pembuat keputusan masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat kurang memperhatikan kepentingan perempuan. Hingga keberadaan perempuan dalam parlemen seolah semu.

Khususnya di daerah-daerah, masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan dan masalah pekerjaan kaum perempuan masih sering sekali dijumpai. Pendidikan menjadi hal yang

sangat penting yang harus dimiliki dalam diri seorang calon legislatif, meskipun pada kenyataannya tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan cukup seimbang di Indonesia namun masih banyak calon yang diduga memalsukan ijazah untuk melengkapi pendaftaran administrasi calon legislatif.

Seperti halnya di Kabupaten Karimun, calon legislatif perempuan dihadapkan dengan permasalahan rendahnya tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Bangsa yang termuat dalam Republika Online mencatat dari total 346 calon legislatif yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT), terdapat 23 orang calon legislatif yang menggunakan ijazah Paket C guna melengkapi administrasi. Sementara beberapa calon legislatif lainnya diprediksi akan bermasalah dengan hukum karena menggunakan ijazah palsu.

Selain masalah pendidikan, memiliki pekerjaan tetap juga merupakan hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan oleh calon legislatif sebelum memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif meskipun setelah menjabat sebagai anggota legislatif mereka harus meninggalkan pekerjaan lamanya guna memberikan perhatian lebih terhadap kewajibannya sebagai wakil rakyat. Tak terkecuali bagi calon legislatif perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap

dikhawatirkan kelak akan menjadikan keikutsertaan dalam pemilihan umum hanya sebagai ajang untuk mencari pekerjaan dan bisa saja merepresentasikan tugasnya sebagai wakil rakyat seolah pekerjaan biasa demi memperkaya diri pribadi. Dalam hal ini, LSM Anak bangsa menginformasikan bahwa hanya 3 (tiga) orang caleg perempuan dalam DCT yang memiliki pekerjaan tetap atau sekitar 98% dari total 120 calon legislatif perempuan DPRD Karimun adalah pengangguran.

2. Modalitas sebagai Pendukung Kemenangan Calon Legislatif

Kemenangan dalam pemilihan umum tentu menjadi harapan dan tujuan setiap calon legislatif. Untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum, seorang calon legislatif haruslah memiliki modal sebagai pendukung kemenangan. Umumnya ada tiga modal yang harus dimiliki untuk memenangkan pemilihan umum, modal tersebut yaitu Modal Sosial (*Social Capital*), Modal Politik (*Political Capital*), dan Modal Ekonomi (*Economic Capital*).

a. Modal Sosial (*Social Capital*)

Menurut Marijan (2006), modal sosial (*social capital*) berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh calon dengan masyarakat yang memilihnya. Modal sosial bisa diukur dari sejauh mana seorang calon legislatif membangun hubungan yang cukup baik dengan

para pemilih melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diikutinya.

Dalam konteks penelitian ini, diketahui bahwa calon legislatif dari Dapil III Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yaitu Hj. Rohani memperoleh kepercayaan masyarakat melalui yang menjadi modal sosial nya ketika maju dalam pemilihan umum, Masyarakat yang ada di dapil III khususnya di Kecamatan Kundur sudah cukup mengenal beliau. Hj. Rohani seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dikarenakan perannya dalam organisasi sosial yang diikutinya.

Selain dukungan yang kuat dari pemilih melalui kepercayaan yang diberikan serta berperan aktif dalam kegiatan sosial melalui organisasi sosial yang diikutinya, modal sosial Modal Politik (*Political Capital*)

b. Modal politik (*Political Capital*)

Menurut Marijan (2006), berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti kontestasi di dalam pemilihan umum, baik di dalam tahap pencalonan maupun di dalam tahap pemilihan.

Peran Tim Sukses/ Relawan/ Tim Pemenangan yang aktif juga tak kalah penting dalam menghadirkan kemenangan bagi calon legislatif. Tim Sukses/ Relawan/ Tim Pemenangan yang aktif berperan dalam membantu

calon legislatif ketika pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih agar tercipta suatu jaringan pemilih yang cukup besar. Pembentukan Tim Sukses Hj. Rohani tidak berdasarkan penunjukan terhadap individu yang mampu menarik pemilih oleh Hj. Rohani, tetapi berdasarkan keinginan dari para relawan yang mau membantu.

Berdasarkan tugas tim relawan yang telah terbagi padatiap-tiap kecamatan yang ada di daerah pemilihan III, diketahui bahwa bahwa tim relawan/ tim sukses berperan besar dalam kemenangan Hj. Rohani dalam pemilihan umum. Peran tim relawan yang aktif dalam menarik pemilih dari kalangan yang berbeda baik suku maupun pekerjaan menjadi strategi yang cukup menarik yang diterapkan oleh Hj. Rohani.

Selain itu jika dilihat, tim relawan yang sebagian besar merupakan perempuan merupakan salah satu faktor kemenangan yang tidak bisa dipinggirkan dan menjadi modal politik Hj. Rohani dalam mengunci kemenangan karena suara pemilih dari kalangan perempuan jika dikelola dengan cukup bijak akan menghasilkan jumlah suara pemilih yang cukup banyak.

Modal politik juga diperoleh Hj. Rohani melalui dukungan partai politik yang mengusungnya yakni Partai Golkar. Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2009 di Kabupaten Karimun memperoleh suara tertinggi yaitu sebanyak 16.408 suara.

Sementara itu pada pemilu tahun 2014, Partai Golkar lagi-lagi mendapatkan perolehan suara terbanyak dengan 22.088 suara. Ini membuktikan bahwa betapa eksistensi Partai Golkar di Kabupaten Karimun sangat diperhitungkan. Kenyataan ini secara tidak langsung memberikan efek kepada perolehan suara Hj. Rohani yang merupakan salah satu calon legislatif perwakilan Partai Golkar.

c. Modal Ekonomi (*Economic Capital*)

Modal ekonomi (*Economic Capital*) berkaitan dengan kemampuan calon legislatif untuk mengakomodasi kekuatan ekonomi yang dimilikinya secara efektif selama waktu yang telah ditetapkan untuk menarik jumlah pemilih. Modal ekonomi seringkali menjadi kekuatan utama seorang calon legislatif dalam rangka mendapatkan suara pemilih.

Dalam pengelolaan modal ekonomi, jika dibandingkan dengan calon legislatif laki-laki, pengelolaan modal ekonomi bagi calon legislatif perempuan bukan merupakan hal yang mudah. Calon legislatif perempuan umumnya kurang berani menghabiskan dana dalam jumlah yang banyak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ambisi yang dimiliki oleh calon legislatif dari kalangan perempuan. Beda halnya dengan calon legislatif laki-laki yang sebagian besar sangat berambisi untuk menjadi anggota legislatif, calon legislatif

perempuan umumnya hanya menghabiskan dana dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Selain itu untuk mendapatkan modal/ dana dalam pembiayaan kampanyenya, calon legislatif perempuan lebih sulit mendapatkan bantuan dari luar atau sponsor karena dianggap kurang berpengalaman dalam berpolitik. Hal ini akan semakin sulit jika calon legislatif perempuan tersebut merupakan ‘muka baru’ dalam pemilihan umum.

Sebagai seorang pengusaha, Hj. Rohani memiliki dana yang cukup guna membiayai segala kebutuhannya untuk maju dalam pemilihan umum. Keseluruhan dana yang didapatkan bersumber dari diri pribadi tanpa ada bantuan dari pihak-pihak lain. Dalam hal alokasi dana terhadap pembiayaan kampanyenya, Hj. Rohani mengakui bahwa alokasi dana dalam kampanye tidak membutuhkan dana yang terlalu banyak seperti halnya yang dilakukan oleh calon legislatif lain. Menurutnya, alokasi dana yang dilakukan haruslah mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pemenuhan barang publik yang memang dibutuhkan, bukan dana yang disumbangkan secara sukarela tanpa memperhatikan manfaat terhadap masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Eksistensi perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia masih kurang, rendahnya minat perempuan dalam dunia politik

menjadi salah satu faktor penyebabnya

2. Pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Karimun menghasilkan satu orang calon legislatif perempuan dalam daftar 10 besar peraih suara tertinggi.
3. Untuk pertama kalinya, calon legislatif perempuan terpilih menjadi anggota legislatif di daerah pemilihan III Kabupaten Karimun
4. Daerah pemilihan III Kabupaten Karimun menempatkan satu caleg perempuan untuk pertama kalinya menjadi anggota legislatif dengan perolehan suara yang cukup tinggi.
5. Untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, seorang calon legislatif harus memiliki dukungan politik yang terdapat dalam tiga modal utama yaitu modal sosial (*Social Capital*), modal politik (*Political Capital*) dan modal ekonomi (*Economic Capital*)
6. Selain mengoptimalkan modalitas dalam pemilihan umum, calon legislatif perlu melakukan pemasaran politik guna menghasilkan suara jumlah pemilih yang cukup banyak dalam pemilihan umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen agar dapat terpenuhi sehingga kaum perempuan mampu melahirkan kebijakan yang lebih optimal.
2. Perlu adanya kebijakan yang lebih mengutamakan kaum perempuan dalam hal pengambilan keputusan agar kinerja legislator perempuan lebih maksimal.
3. Kepada kaum perempuan di Indonesia umumnya dan di daerah-daerah khususnya agar lebih tertarik untuk masuk kedalam dunia politik.
4. Kepada masyarakat agar tidak membeda-bedakan calon legislatif berdasarkan perbedaan *gender* karena yang penting dari calon adalah seberapa jauh ia mampu bertindak dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Referensi buku

- Arifin, Bustanul, dan Didik J. Rachbini. 2002. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Field, Jhon. 2010. *Modal Sosial*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Buku Asli: *Social Capital*, London: Routledge, 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lawang, Robert M.Z. 2004. *Kapita Sosial dalam Perspektif*

Sosiologi: Suatu Pengantar. Depok : FISIP UI Press.

Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah : Pelajaran Dari Pilkada Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHam

Rachbini, D.J. 2002, *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, Dan Perspektif Baru*. Jakarta: CIDES-INDEF

b. Referensi Jurnal

Benister, Mark. 2012. *Getting It, Spending It, Losing It: Exploring Political Capital*. London: University College London

Bourdieu, Pierre. (1986). "The Forms of Capital". Dalam *Handbook of Theory and research for the Sociology of Education*, ed. J. Richardson. New York: Greenwood.

Umainalo, C.B. *Dominasi Modal Ekonomi dalam Ranah Politik*. Academia.edu

c. Referensi Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik